

PENDIDIKAN PERDAMAIAN BERLANDASKAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN FONDASI PENDIDIKAN UNTUK KEMANUSIAAN DI TENGAH KEBERAGAMAN

Oleh:

Gede Agus Siswadi¹, Kusuma Putri²

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada^{1,2}

Email: gede.agus.siswadi@mail.ugm.ac.id¹, kusuma.putri@mail.ugm.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to analyse the role of peace education based on Pancasila values in building the foundation of quality education for humanity. Pancasila as the state ideology as well as the philosophical foundation of the nation has essential principles to create an educational environment that encourages peace as contained in each of its principles, namely divinity or moral-religious, humanist, unity, democracy and justice. Through qualitative research methods and descriptive approaches, the results of this study show that peace education oriented towards Pancasila can shape the character of students by strengthening the values of unity, mutual cooperation, responsibility, and respect. Pancasila-based peace education not only provides knowledge, but also provides a strong foundation for the development of character and attitudes that support the creation of a peaceful and harmonious society. This research is expected to contribute to further understanding of the importance of Pancasila values-based peace education in the context of humanity-centred education development.

Keywords: Education, Peace, Pancasila, Humanity

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan perdamaian berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam membangun fondasi pendidikan yang berkualitas untuk kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi negara dan juga landasan filosofis bangsa telah memiliki prinsip-prinsip yang esensial untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendorong perdamaian seperti yang terkandung di dalam setiap silanya yakni ketuhanan atau moral-religius, humanis, persatuan, demokrasi dan keadilan. Melalui metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan perdamaian yang berorientasi pada Pancasila dapat membentuk karakter peserta didik dengan penguatan nilai-nilai persatuan, gotong royong, tanggung jawab, dan rasa hormat. Pendidikan perdamaian berbasis Pancasila bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memberikan fondasi kuat bagi pengembangan karakter dan sikap yang mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya pendidikan perdamaian berbasis nilai-nilai Pancasila dalam konteks pembangunan pendidikan yang berpusat pada kemanusiaan.

Kata Kunci: Pendidikan, Perdamaian, Pancasila, Kemanusiaan

1. Pendahuluan

Pendidikan adalah proses sistematis yang melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lebih dari sekadar akuisisi informasi, pendidikan melibatkan pembelajaran yang terencana dan terstruktur, yang bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan intelektual, emosional, sosial, dan moral individu. Selain itu pendidikan sebagai medium dalam mempersiapkan individu untuk menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Hal ini melibatkan pengembangan keterampilan kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral, etika, dan sikap terhadap sesama (Siswadi, 2023).

Pentingnya pendidikan terletak pada kemampuannya untuk memberdayakan individu dalam memahami dunia di sekitarnya, mengembangkan potensinya secara penuh, dan berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tentang peningkatan pengetahuan, tetapi juga tentang mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih bermakna dan berdampak. Oleh karenanya, pendidikan memainkan peran sentral dalam merawat kecerdasan secara kognitif, sosial, emosional dan juga spiritual dari setiap individu. Hal ini tentunya, bagaimana mengarahkan pendidikan yang turut melekatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam prosesnya (Siswadi, 2022b).

Pendidikan untuk kemanusiaan adalah suatu konsep yang menekankan pada pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan (Siswadi, 2022c). Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar, empatik, dan bertanggung jawab secara sosial. Pendidikan untuk kemanusiaan menempatkan manusia sebagai pusat dari proses pembelajaran, bukan hanya sekadar memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan kepedulian terhadap sesama (Humaeroh et al., 2021). Hal ini melibatkan pengembangan pemahaman yang lebih dalam tentang hak asasi manusia, toleransi, keadilan, perdamaian, dan keberagaman.

Melalui pendidikan untuk kemanusiaan, individu didorong untuk menjadi pemikir yang kritis, inovatif, dan mampu berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah global yang kompleks (Sa'dullah, 2019). Dengan mempromosikan kerjasama antar-individu dari latar belakang yang beragam, pendidikan untuk kemanusiaan menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Pentingnya pendidikan untuk kemanusiaan semakin terasa dalam menghadapi tantangan zaman modern, di mana masalah-masalah sosial, lingkungan, dan politik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan untuk menemukan solusi yang berkelanjutan (Arfani, 2016).

Pendidikan perdamaian merupakan fondasi krusial dalam upaya membangun dunia yang lebih harmonis, berkelanjutan, dan penuh toleransi. Hal ini tidak hanya mencakup pengajaran tentang konflik dan cara mengatasinya, tetapi juga memperkenalkan prinsip-prinsip dialog, pemahaman, dan kerja sama sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. Pentingnya pendidikan perdamaian terletak pada kemampuannya untuk merangsang pemikiran kritis dan empati, membentuk kesadaran tentang akar masalah konflik, serta mengajarkan strategi untuk mencegah dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai. Melalui pendidikan perdamaian, individu didorong untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang hak asasi manusia, keadilan, dan keragaman budaya, yang pada gilirannya mengurangi ketegangan dan konflik antar kelompok (Alexandra, 2019).

Pendidikan perdamaian juga memainkan peran penting dalam mengajarkan keterampilan resolusi konflik yang efektif, baik di tingkat personal maupun global. Ini melibatkan pengembangan kemampuan komunikasi yang baik, negosiasi, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Dengan memprioritaskan pendidikan perdamaian, masyarakat dapat mempersiapkan generasi muda untuk menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada menciptakan lingkungan yang lebih damai dan inklusif. Melalui pendekatan ini, harapan akan munculnya masyarakat yang mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang menghormati martabat manusia dan mengedepankan dialog, bukan kekerasan. Oleh karenanya, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, sehingga sistem

pendidikan khususnya Indonesia memiliki wawasan mengenai konsep pendidikan perdamaian yang dibingkai dari nilai-nilai Pancasila.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni melalui penelusuran, pembacaan, pencatatan berbagai sumber referensi yang relevan dengan penelitian ini, seperti artikel, buku, maupun sumber dari karya ilmiah lainnya. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti pola analisis dari Miles dan Huberman yakni mulai dari data koleksi, reduksi data, display data, dan penyimpulan data. Penelitian ini juga berupaya untuk menghadirkan gagasan-gagasan yang baru berkaitan dengan konsep pendidikan perdamaian berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam membangun fondasi pendidikan untuk kemanusiaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Pendidikan Perdamaian

Sebelum berangkat lebih jauh mengenai konsep pendidikan perdamaian, maka dalam konteks ini sangat penting untuk menghadirkan bagaimana pandangan para filsuf dalam memformulasikan konsep pendidikan dan perdamaian tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam filsafat Konfusius yang merumuskan konsep pendidikan dan perdamaian menjadi dua elemen utama yang saling terkait dalam membentuk masyarakat yang seimbang dan damai. Konfusius, seorang filsuf Tiongkok kuno, mengemukakan pandangan-pandangannya melalui ajaran-ajaran yang terkumpul dalam tulisan-tulisan seperti "*Lunyu*" atau *Analects*. Dalam konteks ini, konsep harmoni mencakup pemahaman yang mendalam terhadap hubungan antara individu, masyarakat, dan alam (Muyunda & Yue, 2022).

Konfusius menekankan pentingnya pendidikan dalam mencapai harmoni sosial. Pendidikan, menurutnya, harus mendorong pembentukan karakter yang baik dan pemahaman etika yang kuat. Melalui proses ini, individu akan belajar menghormati orang lain, mengembangkan empati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Pendidikan yang berfokus pada aspek-aspek ini diharapkan dapat menciptakan warga masyarakat yang memiliki kesadaran moral tinggi, yang pada gilirannya, menjadi kontributor aktif dalam memelihara perdamaian (Muyunda & Yue, 2022). Konfusius juga menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang harmonis sebagai dasar masyarakat yang damai. Pendidikan, dalam pandangan ini, harus mengajarkan cara berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang kuat, dan menghargai peran masing-masing individu dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, melalui pendidikan, individu diajarkan untuk menjadi bagian dari harmoni sosial dengan menumbuhkan sikap saling pengertian dan kerja sama (Chen, 2016).

Selanjutnya John Dewey lebih menekankan pendidikan sebagai pengalaman hidup yang relevan dengan kehidupan sehari-hari individu (Arifin, 2020). Pendidikan harus menciptakan situasi pembelajaran yang mencerminkan realitas sosial dan memberikan peluang untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang dunia (Sullivan, 1966). Pendidikan menurut Dewey harus berfokus pada pengembangan kemampuan kritis dan kreatif. Individu diajarkan untuk memikirkan secara kritis, mengeksplorasi ide-ide baru, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang inovatif. Dengan demikian, individu akan menjadi lebih siap untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang terus berubah (Dewey, 2002).

Konsep demokratisasi pendidikan adalah inti dari pemikiran Dewey. Pendidikan seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang. Melalui pendidikan demokratis, Dewey percaya bahwa masyarakat dapat menjadi lebih inklusif dan adil, menciptakan dasar untuk perdamaian yang berkelanjutan (Lechte, 2001). Pendidikan menurut Dewey juga harus melibatkan partisipasi aktif dari individu dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang kolaboratif dan interaktif dianggap lebih efektif daripada pendekatan tradisional yang bersifat pasif. Dengan cara ini, individu belajar untuk bekerja sama, memahami perspektif orang lain, dan membangun hubungan sosial yang kuat. Dalam visinya, Dewey memandang pendidikan sebagai proses seumur hidup. Pendidikan bukan hanya terbatas pada lingkungan sekolah, tetapi juga

melibatkan pembelajaran yang terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memandang pendidikan sebagai perjalanan seumur hidup, individu dapat terus berkembang dan berkontribusi pada masyarakat sepanjang hidupnya (Dewey, 2004).

Selanjutnya, yang tidak kalah menariknya adalah pandangan dari Mahatma Gandhi. Pandangan Mahatma Gandhi terhadap pendidikan dan perdamaian tercermin dalam konsepnya tentang anti-kekerasan atau "*ahimsa*" (Siswadi, 2022a). Dalam pemahaman Gandhi, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun karakter yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kedamaian (Gandhi, 1982). Gandhi menekankan bahwa pendidikan harus memusatkan perhatian pada pembentukan karakter yang mencerminkan nilai-nilai etika dan moral. Pendidikan bukan hanya tentang akumulasi pengetahuan, tetapi juga tentang pengembangan kepribadian yang menghormati kehidupan dan mendorong kerjasama. Gandhi juga memandang pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan individu yang sadar akan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman. Pendidikan seharusnya merangsang pengertian dan penghargaan terhadap perbedaan, mempromosikan pemahaman lintas budaya, dan menciptakan dasar bagi kerukunan sosial (Gandhi, 1988).

Gandhi menegaskan bahwa pendidikan harus mendorong pemahaman mendalam tentang "*ahimsa*" atau tanpa kekerasan. Individu harus diajarkan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai, menghindari kekerasan fisik maupun verbal, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perdamaian (Richards, 1985). Selanjutnya, pendidikan dalam visi Gandhi harus memperkuat kemandirian dan keterlibatan masyarakat. Individu diajarkan untuk mengambil tanggung jawab dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan, dan mempromosikan keadilan. Gandhi menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam pendidikan. Pendidikan harus membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk kebutuhan sehari-hari, serta memberikan dasar bagi pemberdayaan dan keberlanjutan dalam upaya membangun perdamaian.

Pendidikan perdamaian adalah pendekatan pendidikan yang terfokus pada pengembangan pemahaman, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan, memelihara, dan memperdalam kedamaian dalam berbagai konteks sosial, mulai dari interaksi individu hingga tingkat global. Definisi pendidikan perdamaian meliputi proses pembelajaran yang mempromosikan pemahaman mendalam tentang konflik, keterampilan resolusi konflik, pemupukan empati, penghargaan terhadap keberagaman, dan pembentukan hubungan yang harmonis. Pendidikan perdamaian bukan sekadar tentang menghindari konflik, tetapi juga tentang memahami akar penyebabnya dan mengajarkan cara-cara konstruktif untuk menyelesaikan konflik. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang ketidakadilan, diskriminasi, dan sumber konflik sosial lainnya yang mengganggu perdamaian di tingkat pribadi, antar-individu, dan antar masyarakat (Wulandari, 2010).

Pendidikan perdamaian mencakup pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif, negosiasi yang bijaksana, pemecahan masalah yang kolaboratif, dan penanaman nilai-nilai seperti toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan perdamaian juga melibatkan pembelajaran tentang sejarah konflik dan upaya perdamaian, serta memperkenalkan strategi-strategi yang berhasil dalam menciptakan perdamaian di berbagai konteks, termasuk pendekatan non-kekerasan, diplomasi, dialog antarbudaya, dan kolaborasi internasional. Selain itu, pendidikan perdamaian juga sebagai ajang dalam memberikan pemahaman bahwasanya dalam menciptakan perdamaian bukanlah hanya tanggung jawab individu atau kelompok tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan aktif dan kerjasama dari seluruh masyarakat, lembaga-lembaga, dan negara-negara di seluruh dunia.

Pentingnya peningkatan kesadaran sosial dalam pendidikan perdamaian menjadi sorotan utama, dengan fokus pada membangun pemahaman mendalam tentang dinamika masyarakat. Melalui eksplorasi isu-isu sosial kontemporer dan penggunaan kasus studi, siswa didorong untuk memahami dan menganalisis permasalahan seperti ketidaksetaraan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang dapat menjadi pemicu konflik. Kesadaran sosial diperkaya melalui penghargaan terhadap

keberagaman budaya dan etnis, mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan dan memahami kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat dengan latar belakang yang beragam.

Pendidikan perdamaian juga memanfaatkan pengalaman praktis di masyarakat dan aktivitas lapangan, memberikan siswa kesempatan untuk melihat secara langsung tantangan sosial dan meresponsnya secara aktif. Siswa juga diberdayakan untuk berperan aktif sebagai agen perubahan dengan mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan perdamaian dalam lingkungan sekitarnya (Sa'diyah & Nurhayati, 2019). Dengan membina keterhubungan antar-individu dan mengajarkan empati serta simpati, pendidikan perdamaian menciptakan dasar bagi pertumbuhan kritis dalam berpikir sosial. Melalui penggunaan media dan teknologi, siswa dapat diperkenalkan pada realitas sosial di berbagai belahan dunia. Kesadaran sosial yang ditingkatkan juga merangsang pertumbuhan kritis dalam berpikir sosial, memungkinkan siswa untuk menggali akar masalah, menganalisis dampak sosial, dan merancang solusi yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi masyarakat.

Selain itu, pentingnya pencegahan kekerasan dan *bullying* menjadi fokus utama dalam konsep pendidikan perdamaian. Sekolah yang aman dan damai merupakan prasyarat esensial untuk pembelajaran yang optimal (Djamil, 2016). Dalam pendidikan perdamaian, perhatian khusus diberikan pada pembentukan budaya anti-kekerasan di lingkungan sekolah. Siswa tidak hanya diajarkan untuk menghormati keberagaman dan menerima perbedaan, tetapi juga diberdayakan dengan keterampilan sosial efektif, seperti komunikasi yang baik, empati, dan resolusi konflik tanpa kekerasan. Pendidik berperan sebagai model perilaku positif, menunjukkan cara membangun hubungan yang baik dan bijak dalam menanggapi konflik. Pentingnya penghargaan terhadap perbedaan juga menjadi landasan dalam pencegahan kekerasan. Siswa diberdayakan untuk menghormati keunikan setiap individu dan merangkul keragaman sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber konflik. Dalam hal ini, penguatan peran siswa sebagai pemimpin positif menjadi penting, memungkinkan anak didik untuk menjadi garda terdepan dalam menghentikan perilaku *bullying* sejak dini, membangun iklim sekolah yang positif, dan membentuk budaya perdamaian. Oleh karenanya, pendidikan perdamaian berperan sebagai kekuatan pendorong untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bersama, bebas dari ancaman kekerasan, dan kaya akan nilai-nilai perdamaian.

3.2 Desain Pendidikan Perdamaian Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila

Memaknai pendidikan perdamaian pada dasarnya merujuk pada sifat damai yang kemudian mengantarkan pada model pendidikan yang bersifat anti kekerasan, anti diskriminasi, dan berpegang teguh dalam menjunjung nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan perdamaian menjadi alternatif dalam proses pencegahan tindak kekerasan dan hal-hal yang menjadi akar bagi ketidakteraturan hidup serta konflik yang berpotensi terjadi pada bangsa ini.

Indonesia sebagai bangsa yang beragam dan mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan memang sudah saatnya untuk berfokus pada model pendidikan yang dapat mengantarkan individu untuk dapat berkembang serta bertanggung pada kelompok sosialnya. Hal ini dikarenakan dalam kelompok sosial inilah individu akan menjadi subjek pengemban atas isu sosial yang terjadi. Isu sosial yang menjadi perhatian ialah hal-hal yang menyangkut kekerasan, konflik, dan diskriminasi yang sama sekali tidak mengindahkan citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila.

Menurut Kartadinata, dkk sebagaimana yang dikutip oleh (Harpendya et al., 2022) pendidikan perdamaian menjadi sebuah proses bagi individu untuk dapat mengubah sikap dan perilakunya terkait konflik kekerasan, mendapatkan pengetahuan, nilai-nilai, dan mengembangkan keterampilan serta perilaku hidup yang rukun pada orang lain. Kondisi atau keadaan damai yang dinamis serta kemampuan adaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah menjadi titik tekan bagi terwujudnya sebuah perdamaian. Individu yang berhasil berada pada kondisi damai akan mengantarkannya pada kondisi ketenangan sosial, ketenangan pikiran, dan ketenangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan perdamaian pada era modern saat ini ditekankan pada pemahaman yang menyatakan bahwa konflik sebagai pemicu terjadinya perdamaian yang sesungguhnya atau biasa dikenal dengan perdamaian positif. Untuk memahami munculnya suatu konflik yang terjadi di dalam masyarakat dikarenakan oleh beberapa aspek di antaranya; *pertama*, adanya kemungkinan bahwa konflik akan menghasilkan nilai-nilai positif, *kedua*, masyarakat membangun konflik secara sosial, *ketiga* adanya hakikat dan kondisi manusia yang heterogeny, *keempat* sudut pandang konflik harus didasarkan pada konteks sosialnya sendiri, *kelima* konflik terjadi secara alamiah dan dinamis, *keenam* konflik dilihat sebagai keuntungan bagi pihak-pihak yang berkonflik (Harpendya et al., 2022).

Pendidikan perdamaian yang mengacu pada terbangunnya kedamaian, keteraturan, dan mencegah adanya tindak kekerasan serta diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini sangat relevan dengan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang senantiasa menuntun warga negara untuk dapat menjadi pribadi yang humanis dan penuh kasih pada sesama manusia. Pancasila dapat menjadi sumber nilai atau etika bagi pendidikan perdamaian yang khas bangsa Indonesia. Pendidikan perdamaian yang bersifat keindonesiaan yang berdasarkan falsafah dasar negara ini yakni Pancasila.

Indonesia dengan segala kemajemukannya tentu memberikan tantangan tersendiri bagi bangsa ini untuk selalu mengupayakan kondisi yang paling demokratis untuk semua komunitas yang ada di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Suseno, 2022) bahwa kemajemukan Indonesia menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan wilayah nusantara terdiri dari ribuan pulau yang di dalamnya terdapat ratusan etnik, budaya, dan agama serta beragamnya bahasa ibu yang dimiliki.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mendasarkan diri pada nilai-nilai dan cita-cita kehidupan yang dimiliki oleh seluruh komunitas di Indonesia secara bersama-sama, dan bukan didasarkan pada identitas agama mayoritas maupun suku yang terbesar. Dengan demikian, di Indonesia semua komunitas nusantara yang terdiri dari berbagai macam etnik, budaya, dan agama akan sangat beragam akan tetap menemukan dasar kebersamaan dimiliki secara bersama, yakni Pancasila (Suseno, 2022).

Keberagaman yang dimiliki Indonesia serta dasar negara yang sangat relevan bagi terciptanya persatuan, kesatuan, dan harmoni dalam kehidupan keberagaman ini akan berimplikasi positif bagi pendidikan perdamaian khas Indonesia. Pendidikan perdamaian yang bertaut dengan Pancasila sebagai basis nilai-nilai moralitas kebangsaan yang mengajarkan menjadi pribadi baik, humanis, dan cinta damai. Oleh sebab itu, pendidikan perdamaian berbasis nilai Pancasila ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya membangun sikap cinta damai, anti kekerasan, dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pendidikan perdamaian yang didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila akan menjadi alat bagi terbentuknya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Desain pendidikan perdamaian yang didasarkan oleh nilai-nilai Pancasila ini merujuk pada kelima sila yang ada di dalam Pancasila. Hal ini dimaksudkan agar model pendidikan perdamaian ini menjadi otentik khas Indonesia dan aplikatif pada saat diterapkan pada proses pendidikan yang berlangsung di negara ini. Selain itu, peran Pancasila sebagai sistem nilai budaya telah bertumbuh dan bersemi bersamaan dengan bertumbuhnya bangsa Indonesia. Sistem nilai budaya ini menjadi kultur normative karena telah menjadi dasar dan pedoman bagi perilaku pribadi bangsa Indonesia. Nilai budaya sebagai perwujudan relasi manusia terhadap lingkungan alam dan sosial nampak dalam perbuatan dan tindak tanduk masyarakatnya. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi pandangan hidup (*way of life*) yang merupakan filsafat implisit bagi bangsa Indonesia (Rindjin, 2012).

Pendidikan perdamaian yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila akan mencakup beberapa hal di antaranya; Pertama, nilai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa akan mengarahkan peserta didik untuk menjadi pribadi manusia yang religius. Manusia religius yang mengindahkan nilai agama dengan mematuhi semua ajaran yang Tuhan berikan. Selain itu, akan diarahkan pada sikap reflektif bagi peserta didik untuk dapat meniru sifat Tuhannya Yang Maha Baik, Maha Bijaksana, Maha Mulia, dan Maha Pengasih sehingga akan membentuk pribadi peserta didik yang sangat menjunjung nilai-

nilai kebaikan yang bersumber dari agama dan Tuhannya. Pendidikan perdamaian yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan ini akan menjadikan model pendidikan yang anti akan sikap kekerasan, diskriminasi, dan menyakiti sesama manusia karena tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan untuk saling serang dan rendah empati. Namun sebaliknya, semua ajaran Tuhan dalam agama mengajak manusia untuk selalu berbuat baik, menyayangi seluruh manusia dan memanusiakan manusia.

Kedua, nilai dari sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab akan mengarahkan peserta didik menjadi pribadi yang humanis. Pribadi manusia yang memiliki jiwa welas asih yang tinggi serta mampu memiliki rasa sepenanggungan terhadap sesama teman peserta didik. Hal ini sebagaimana sifat manusia sebagai *homo recentis* yakni makhluk yang memiliki ketajaman rasa atau kepekaan rasa terhadap sesama manusia (Rindjin, 2012). Kepekaan rasa inilah yang perlu dibudayakan dalam dunia pendidikan hari ini, supaya peserta didik dapat mengasah jiwa kepeduliannya terhadap sesama rekan. Apabila dalam konteks perdamaian, maka ketika peserta didik dihadapkan oleh kejadian atau isu-isu yang mengarahkan pada konflik, perpecahan, diskriminasi dan kekerasan peserta didik mampu memosisikan dirinya sebagai orang yang menjadi korban sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang berpotensi terjadi kekacauan. Lebih dari itu, peserta didik dapat menjadi agen perdamaian (*agent of peace*) dalam kehidupan sehari-harinya. Inilah tujuan yang dicapai melalui pendidikan perdamaian khususnya yang berlandaskan nilai sila kedua Pancasila.

Ketiga, nilai dari sila Persatuan Indonesia ini akan mengarahkan peserta didik untuk memiliki jiwa persatuan terutama dalam menyemai nilai-nilai perdamaian. Nilai persatuan akan diajarkan melalui sikap gotong royong, kerjasama, kolaborasi, dan bersinergi dalam suatu kelompok atau grup peserta didik dalam menghadapi persoalan yang bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian. Contohnya ialah saat peserta didik berkelompok berusaha untuk mendamaikan teman yang sedang berkelahi atau berselisih pendapat. Peserta didik akan diarahkan menjadi mediator dan menjadikan kepentingan bersama untuk menjunjung perdamaian lebih diutamakan dibandingkan dengan mendahulukan ego pribadi yang memicu konflik dan tindakan yang saling meresahkan. Dengan adanya nilai persatuan ini akan mengajak peserta didik untuk dapat menghargai berbagai macam sudut pandang, pilihan pribadi, dan perbedaan yang ada. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan dan keindahan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai kedamaian dan ketenangan.

Keempat, nilai dari sila Kerakyataan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan akan mengarahkan peserta didik untuk memiliki sikap yang menjunjung tinggi demokrasi dan saling bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Pendidikan perdamaian membutuhkan sikap peserta didik yang demokratis dan menjunjung mufakat. Hal ini untuk memperluas cara pandang, dan menjadikan peserta didik memiliki pemikiran yang terbuka (*open mind*) terhadap berbagai macam isu atau kejadian yang terjadi lintas agama, budaya, dan kepentingan. Proses pendidikan perdamaian yang didasarkan nilai sila keempat ini akan menjadikan peserta didik sebagai murid yang berpikiran terbuka, demokratis dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Justru, akan mengambil banyak pelajaran atau sudut pandang dari pihak lain agar dapat mengedepankan atmosfir demokratis (menyuarakan pendapat) di sekolah maupun di masyarakat nantinya. Dengan demikian, sila keempat Pancasila sebagai penggerak sikap bijaksana dan perilaku peserta didik untuk lebih terbuka dengan masalah konflik, berani menyampaikan kebenaran, dan mencari jalan keluar berdasarkan sudut pandang komunitas atau kelompok untuk lebih mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau segelintir orang maupun kelompok karena semua memiliki hak yang sama.

Kelima, nilai dari sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ini akan mengarahkan peserta didik untuk memiliki sikap yang objektif dalam menilai suatu permasalahan khususnya dalam proses pendidikan perdamaian. Sikap objektif akan melatih kemampuan peserta didik dalam menimbang suatu permasalahan atau gejolak sosial yang sedang terjadi agar tidak mudah menyalahkan atau mengambil sikap yang justru membuat keadaan semakin meresahkan. Sejalan dengan hal tersebut, sikap objektif akan memosisikan peserta didik untuk dapat bersikap adil dalam

menilai kejadian atau permasalahan yang terjadi terutama perihal perbedaan pendapat Sikap objektif inilah yang menjadikan kultur pendidikan perdamaian menjadi lebih inklusif dan memberikan peluang pada siapapun untuk menebarkan kebaikan, menyemai kepercayaan sehingga tidak mudah terombang ambing oleh opini yang berkembang terutama untuk menjerumuskan pada hal-hal yang menimbulkan perpecahan. Dengan demikian, sila kelima Pancasila akan menguatkan sikap peserta didik untuk memiliki sikap objektif dan menghargai setiap hak-hak yang dimiliki sesama teman di sekolah serta berusaha mendahulukan rasional dibandingkan emosional dalam melihat fakta yang terjadi.

3.3 Desain Pendidikan untuk Kemanusiaan Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila

Secara sederhana, pendidikan untuk kemanusiaan merupakan paradigma pendidikan yang bertujuan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter manusia yang sadar akan nilai-nilai kemanusiaan (Siswadi, 2023). Dalam konteks ini, pendidikan ini menitikberatkan pada pengembangan kesadaran hak asasi manusia, mendorong siswa untuk memahami dan mempertahankan hak-hak dasar setiap individu. Pendidikan damai menjadi satu-satunya jalan yang ditempuh untuk menanamkan resolusi konflik yang non-kekerasan dan merangkul keragaman budaya dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu, pendidikan untuk kemanusiaan juga mengupayakan dalam menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, menciptakan lingkungan belajar yang menghormati dan memberdayakan setiap individu. Dengan memfokuskan pada keterampilan sosial, empati, dan toleransi, pendidikan ini membentuk siswa menjadi individu yang dapat berinteraksi dengan bijak di dalam masyarakat yang multikultural.

Pendidikan untuk kemanusiaan juga menggandeng pendidikan lingkungan, mendidik siswa untuk menjadi warga bumi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap ekosistem. Dengan pendekatan kolaboratif, siswa diajarkan untuk bekerja sama dan menghargai keberagaman pendapat sebagai sumber ide. Kesadaran multikultural menjadi fokus, memastikan bahwa siswa memahami dan menghargai keberagaman budaya yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, pendidikan untuk kemanusiaan bukan hanya menjadi landasan pendidikan formal, tetapi juga sebuah gerakan untuk mencetak generasi yang peduli, inklusif, dan berdaya untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat dan dunia.

Desain pendidikan untuk kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai Pancasila pada prinsipnya mengintegrasikan konsep dan nilai-nilai dasar dari dasar filsafat dan ideologi bangsa Indonesia ke dalam kurikulum dan praktek pendidikan. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk membentuk karakter dan mengarahkan pendidikan menuju pengembangan manusia yang berdaya, bertanggung jawab, dan berintegritas. *Pertama*, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai fondasi moral. Pendidikan untuk kemanusiaan dengan nilai-nilai Pancasila mendorong pengembangan spiritualitas dan rasa keterhubungan dengan sesama manusia, menjadikan ketahanan rohaniah sebagai landasan kuat bagi kepedulian sosial.

Kedua, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mendorong pendidikan untuk fokus pada pembentukan manusia yang peduli, empatik, dan beradab. Pada wilayah ini hendaknya memasukkan kurikulum yang mengembangkan kemampuan siswa untuk berkontribusi pada kebaikan bersama, memahami dan menghormati nilai-nilai budaya, serta mempromosikan perdamaian dan toleransi. *Ketiga*, Persatuan Indonesia, menuntut desain pendidikan untuk mempromosikan rasa persatuan dan persaudaraan di antara siswa. Pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler harus merangsang kolaborasi, dialog antar-budaya, dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman bangsa Indonesia.

Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, menekankan pentingnya pengembangan kebijaksanaan dan kepemimpinan yang berbasis demokratis. Pada konteks ini hendaknya pendidikan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. *Kelima*, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pada pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk

mencapai pemerataan kesempatan. Desain ini harus mencakup program-program yang mendukung akses pendidikan yang setara bagi semua, termasuk juga yang berada di daerah terpencil atau berkebutuhan khusus.

Dengan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam desain pendidikan untuk kemanusiaan, proses pendidikan menjadi lebih dari sekadar transfer pengetahuan. Pendidikan menjadi wahana untuk membentuk karakter yang sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia, menciptakan warga negara yang berbudaya, berdaya, dan peduli terhadap kemanusiaan secara keseluruhan. Prinsip ini dapat mewujudkan visi pendidikan sebagai pilar pembangunan manusia dan masyarakat yang adil, beradab, dan bersatu dalam keragaman.

4. Simpulan

Pendidikan perdamaian yang berakar pada nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membangun fondasi pendidikan yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar filosofis yang mengandung prinsip-prinsip moral, keadilan, dan persatuan, menjadi landasan utama dalam membentuk individu yang memiliki kesadaran akan pentingnya perdamaian dan toleransi. Pendidikan ini menekankan penguatan karakter dengan mengajarkan nilai-nilai seperti gotong royong, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi, menjadi fondasi kokoh dalam membangun masyarakat yang damai. Integrasi nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal, dengan merancang mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler yang konsisten mempromosikan pemahaman mendalam tentang perdamaian. Dengan demikian, pendidikan perdamaian berlandaskan nilai-nilai Pancasila bukan sekadar memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang mampu menjaga harmoni dan kedamaian dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alexandra, F. (2019). *Pendidikan Perdamaian dan Fenomena Kekerasan Kultural pada Anak dan Remaja di Indonesia*. *Jurnal Paradigma (JP)*, 7 (3), 105-117.
- Arfani, L. (2016). Mengurai Hakikat Pendidikan, Belajar dan Pembelajaran. *Jurnal PPKn Dan Hukum*, 11(2), 81-97.
- Arifin, N. (2020). Pemikiran Pendidikan John Dewey. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 2(2), 204-219. <https://doi.org/10.47476/as.v2i2.128>
- Chen, L. (2016). *The Ideas of "Educating" and "Learning" in Confucian Thought*. In X. Di & H. McEwan (Eds.), *Chinese Philosophy on Teaching and Learning* (pp. 77-96). State University of New York Press.
- Dewey, J. (2002). *Pengalaman dan Pendidikan*. Diterjemahkan oleh John De Santo. Yogyakarta: Kepel Press.
- Dewey, J. (2004). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*. Delhi: Aakar Books.
- Djamal, M. (2016). *Fenomena Kekerasan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gandhi, M. K. (1982). *Gandhi Sebuah Otobiografi: Kisah Eksperimenku dalam Mencari Kebenaran*. Alih Bahasa Gedong Bagus Oka. Jakarta: Sinar Harapan.
- Gandhi, M. K. (1988). *Semua Manusia Bersaudara, Kehidupan dan Gagasan Mahatma Gandhi Sebagaimana Diceritakan Sendiri*. Terjemahan Kustiniyati Mochtar . Jakarta: Gramedia.
- Harpendya, G., Sumantri, S. H., & Wahyudi, B. (2022). Pendidikan Perdamaian: Sebuah Urgensi di tengah Maraknya Konflik Sosial Berdimensi Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 77-86.
- Humaeroh, S., Abdulatif, S., Winarti, & Windayana, H. (2021). Pedagogik Kritis dalam Membangun Pendidikan Humanis. *Aulad: Journal on Early Childhood* , 4(3), 174-182.
- Lechte, J. (2001). *50 Filsuf Kontemporer: Dari Strukturalisme Sampai Postmodernitas*. Terj. A. Gunawan Admiranto. Yogyakarta: Kanisius.
- Muyunda, G., & Yue, L. (2022). *Confucius Education Thoughts and Its Influence on Moral Education in China*. *International Journal of Social Learning (IJSL)*, 2 (2), 250-261.

- Richards, G. (1985). *The Philosophy of Gandhi: A Study of His Basic Ideas*. London: Curzon Press Ltd.
- Rindjin, K. (2012). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Kompas Gramedia: Jakarta. .
- Sa'diyah, H., & Nurhayati, S. (2019). Pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur: Kajian Filosofis Pemikiran Pendidikan Gus Dur. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 14 (2), 175-188.
- Sa'dullah, A. (2019). Ontologi Pendidikan Humanis dan Relevansinya dengan Pendidikan di Era Global. *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 131–136.
- Siswadi, G. A. (2022a). Filsafat Nir-Kekerasan dalam Perspektif Mohandas Karamchand Gandhi dan Relevansinya dalam Pencegahan Gerakan Radikalisme di Indonesia. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 5(2), 48–65.
- Siswadi, G. A. (2022b). Pemikiran Filosofis Paulo Freire Terhadap Persoalan Pendidikan dan Relevansinya dengan Sistem Merdeka Belajar di Indonesia. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 9(2), 142–153.
- Siswadi, G. A. (2022c). Pendidikan yang Membebaskan dalam Pandangan Ivan Illich: Suatu Kritik Terhadap Sistem Dehumanisasi dalam Pendidikan. *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*.
- Siswadi, G. A. (2023). *Merayakan Kemerdekaan dalam Belajar*. Badung: Nilacakra.
- Sullivan, P. (1966). John Dewey's Philosophy of Education. *The High School Journal*, 391–397.
- Suseno, F. M. (2022). Di Abad Ke-21: Pancasila Apa Masih Diperlukan?. *Jurnal Pancasila*, 3 (2), 1-12.
- Wulandari, T. (2010). Menciptakan Perdamaian Melalui Pendidikan Perdamaian di Sekolah. *Mozaik*, 5 (1), 68-83.